

KONFLIK ANTARA TUJUAN PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN KUALITAS LINGKUNGAN

Elly Rusmalia

Abstrak

Konflik antar tujuan pertumbuhan ekonomi dengan kualitas lingkungan selalu terjadi dan perlu disikapi oleh pelaku ekonomi sehingga menguntungkan antar kelompok yang menggunakannya terutama untuk generasi yang akan datang.

Konflik diatas dapat menimbulkan konflik antar kelompok dan timbul pertanyaan: siapa yang harus membayar pengelolaan air yang tercemar ? apakah pemilik pabrik atau pengguna air sungai untuk rekreasi atau keduanya.

Kata Kunci: Pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan

1. Pendahuluan

Manajemen sumber daya alam mempunyai tiga tujuan sosial (Surna T. Dj. 1997) yaitu: 1) pertumbuhan ekonomi; 2) kualitas lingkungan; 3) kepedulian antar generasi. Tujuan pertumbuhan ekonomi meliputi pengoptimalan pendapatan nasional apabila penekanannya hanya pada satu tujuan ini, maka akan menghamburkan sumber daya alam yang ada. Sumber daya alam dibagi menjadi dua katagori yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Seandainya penekanan pada tujuan peertumbuhan ekonomi saja dapat mengubah bentuk sumber yang bisa diperbaharui menjadi sumber yang tidak diperbaharui dan akan mengakibatkan pemborosan sumber daya.

Sayangnya, justru masalah inilah yang dihadapi dalam abad ini. Jika industri dan perusahaan, bahkan rumah tangga, telah berhubungan dengan sumber lingkungan, mereka umumnya mengambil begitu saja atau mereka melakukan langkah

pemotongan biaya sebesar-besarnya. Misalnya: pembuangan limbah yang tidak diolah kelautan dan sungai karena semata demi tujuan pemotongan biaya, sangat mempengaruhi regenerasi sumber kelautan dan sungai serta banyak contoh lainnya yang sejenis. Untuk hal ini pihak manajemen harus memasukan masalah pertumbuhan ekonomi dan kepedulian regenerasi.

Untuk tujuan kualitas lingkungan yaitu memulihkan kembali, meningkatkan dan melindungi kualitas sumber daya alam serta sistem ekologi. Misalnya : kita harus membersihkan air yang tercemar limbah, dan harus meningkatkan pengawasan yang ketat terhadap emisi hingga kota dapat terbebas dari asap. Di sisi lain, kita harus melindungi sumber-sumber lingkungan, seperti perlindungan terhadap pemanfaatan hutan dan perikanan, karena jika tidak terkendali dapat mengancam keberlanjutannya. Ini juga akan menimbulkan konflik kepedeluan anta generasi. Konflik ini telah diketahui terutama dengan konteks sumber energi. Sesungguhnya telah disadari bahwa hampir seluruh sumber daya yang tidak dapat diperbaharui akan habis dalam kurun waktu kurang dari 200 tahun (Lecomber, 1979).

Tujuan kepedulian antar generasi adalah meyakinkan bahwa keberadaan dan produktifitas sumber-sumber daya alam kita harus dipertahankan dari generasi ke generasi. Sebagai contohnya adalah penebangan hutan yang tidak berwawasan lingkungan sungguh merupakan masalah global. Untuk Indonesia, angka penebangan hutan tropis diperkirakan mencapai 7,5 kilometer persegi tiap hari (Surna T. Dj, 1997). Dalam tulisan ini akan dibahas konflik antara tujuan pertumbuhan ekonomi dengan kualitas lingkungan serta konflik antar kelompok .

2. Analisis Konflik antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Kualitas Lingkungan.

Dalam pembahasan ini digunakan asumsi dengan model pasar persaingan sempurna. Sebagai contoh terdapat satu pabrik yang terletak di hulu sungai dimana pabrik ini menghasilkan barang-barang, sebut saja barang ABC. Proses pembuatan barang ABC ini juga menghasilkan racun yang dibuang begitu saja ke sungai. Kemudian pabrik itu diminta untuk mendirikan pusat pengendalian

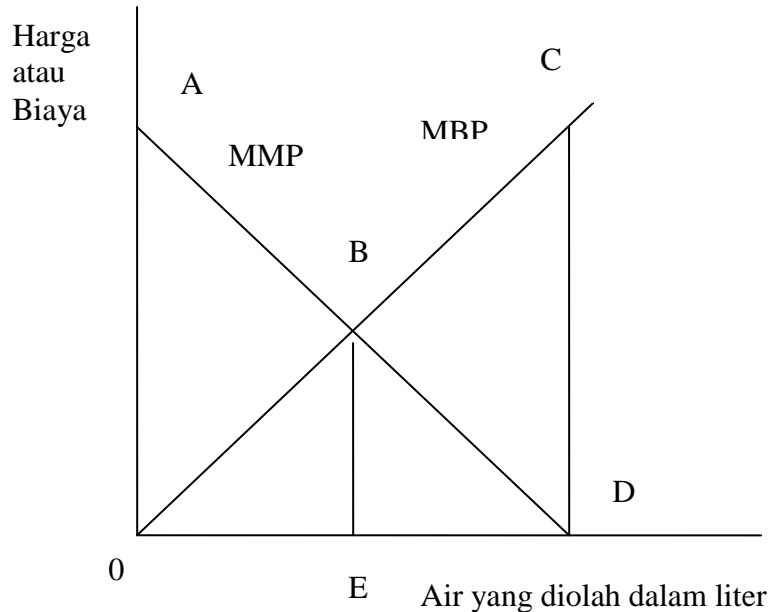
air di hulu guna membersihkan air yang mengalir ke hilir, karena ada tempat rekreasi di hilir. Lalu, asumsikan bahwa harga barang ABC adalah 20 perunit. Maka total penerimaan (TR) adalah $20q$ atau $TR = 20q$ dan Marginal Revenue (MR) = 20 dimana q adalah jumlah produksi ABC. Sekarang kita misalkan Total Biaya (TC) adalah $2q^2$ dan didapat Marginal Cost (MC) = $4q$ sehingga untuk mendapat keuntungan maksimum syaratnya adalah $MR = MC$ maka $20 = 4q$ jadi $q = 5$ artinya untuk mendapat keuntungan maksimum, produksi yang harus dihasilkan adalah 5 unit.

Sekarang apabila dalam tujuan produksi ABC diperluas untuk memasukan faktor lain yaitu pabrik diharuskan mengelola air yang tercemar maka total biaya pengelolaan air menjadi $TC = q^2$ maka marginal costnya adalah $MC = 2q$ dan sekarang total biaya keseluruhannya menjadi TC adalah $2q^2 + q^2 = 3q^2$ dan biaya marjinalnya adalah $MC = 6q$. Untuk mendapat keuntungan maksimal adalah $MR = MC$ sehingga didapat produksi sebesar 3,3 unit. Sehingga keuntungan akan berkurang dengan adanya biaya pengelolaan air maka pemilik perusahaan biasanya tidak akan memasukan biaya kualitas lingkungan atau pengelolaan air kecuali jika dipaksa oleh pemerintah dengan peraturan daerah untuk menyadarkan pemilik perusahaan tersebut dimana tidak mempunyai hak milik atas sungai. Pemakai sungai di hilir juga tidak berhak atas pemilikan sungai sehingga dalam memelihara sungai harus bekerjasama antara pemilik pabrik dengan pemakai sungai yang berada di hilir. Sehingga akhirnya konflik akan terjadi antar kelompok.

3. Kerangka Konflik antar Kelompok Masyarakat.

Sumber konflik yang paling awal adalah pertanyaan tentang siapa yang harus membayar peneglolaan air yang tercemar ? Kerangka analisis konflik yang pertama kali digambarkan oleh Coase (1967) dengan menggunakan analisis dua kurva yaitu kurva biaya marjinal pengendalian pencemaran air (MBP) dan kurva keuntungan marjinal dari pengendalian pencemaran (MMP). Kurva MBP yaitu biaya yang harus ditanggung oleh pabrik untuk mengendalikan pencemaran dan kurva MMP menjelaskan

keuntungan marginal yang bertambah pada pihak pengelola rekreasi dan dapat diperoleh dari pemakai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar berikut ini:



Dari gambar diatas kita lihat bahwa asumsikan bahwa sungai dimiliki sepenuhnya oleh pabrik. Dalam hal ini, pabrik akan menolak menyediakan pengendalian pencemaran kecuali jika pabrik dibayar untuk membangunnya. Jadi mereka yang berada di hilir harus membayar kepada pabrik sebesar yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat pengelolaan air yang diinginkan. Jika pemakai di hilir menginginkan OD liter air yang dikelola, maka mereka harus membayar pabrik sebesar area dibawah kurva MBP hingga OD liter yakni area OCD. Dengan demikian OD unit pengendalian pencemaran akan memberikan total keuntungan pada pemakai di hilir sebesar area di bawah kurva MMP, yakni area OAD. Jika masyarakat hilir dipersiapkan untuk tahan dengan tingkat pengendalian pencemaran dibawah OD liter air, maka mereka mendapatkan pengeluaran berikut ini: 1) pengeluaran ekstra dari keuntungan pengelolaan rekreasi dan 2) biaya pengendalian pencemaran yang harus dibayarkan pada pabrik. Sebagai contoh, jika pemakai di hilir dipersiapkan untuk hidup

dengan ED liter air tercemar (yakni hanya OE liter air yang dikelola), maka pengeluaran mereka adalah: 1) area BED dalam hubungannya dengan keuntungan rekreasi yang mereka korbankan dan 2) area OBE dalam hubungannya dengan biaya pengelolaan. Dengan adanya hal tersebut maka penghematan biaya maksimal ditunjukkan oleh area BCD yang didapat dari area OCD – (area OBE + area BED). Dari hal tersebut juga dapat dihitung keuntungan bersih maksimal pengelola rekreasi yaitu area dibawah kurva MMP dikurangi area di bawah kurva MBP atau area OAD – (area OBE + area BED) dimana OBE adalah total biaya OE liter dikurangi biaya yang dibayarkan kepada pabrik karena mereka memiliki sungai dan area BED adalah keuntungan yang harus dikorbankan.

Sekarang kita asumsikan bahwa sungai dimiliki sepenuhnya oleh pemakai di hilir. Dalam kasus ini, jika pabrik ingin mencemari sungai maka dia harus membayar kepada pemakai di hilir sebesar keuntungan yang hilang dari pengelolaan rekreasi. Maka biaya pengendalian pencemaran yang dikeluarkan oleh pabrik adalah: 1) area OBE untuk pengendalian OE liter dan 2) area BED sebagai kompensasi pemakai di hilir untuk keuntungan pengelola rekreasi terhadap apa yang tidak mereka lakukan. Maka penghematan biaya maksimalnya adalah area OAD – (area OBE + area BE) = area OAB. Pabrik akan mengeluarkan biaya yang lebih kecil dari area OAB apabila tingkat pengendalian pencemaran bukan OE liter. Dalam kenyataannya terjadi kesulitan dalam mencapai tingkat optimal pengendalian pencemaran apabila ada beberapa pabrik di sepanjang sungai dan ada beberapa kelompok pemakai di hilir. Masalah ini akan memberikan dasar yang berguna untuk suatu kebijakan pemerintah. Jika kita bisa membangun kurva MMP dan MBP, maka kita dapat menggunakan area OBE sebagai dasar pajak untuk pencemaran tetapi menjadi sulit apabila terlalu banyak pencemaran dan pihak yang terlibat.

4. Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Tujuan pertumbuhan ekonomi, kualitas lingkungan dan kepedulian antar generasi perlu dimasukkan dalam tujuan manajemen sumber daya alam supaya kerusakan lingkungan mulai berkurang di masa yang akan datang.
2. Konflik antar tujuan pertumbuhan ekonomi dengan kualitas lingkungan selalu terjadi dan perlu disikapi oleh pelaku ekonomi sehingga menguntungkan antar kelompok yang menggunakannya terutama untuk generasi yang akan datang.
3. Konflik diatas dapat menimbulkan konflik antar kelompok dan timbul pertanyaan: siapa yang harus membayar pengelolaan air yang tercemar ? apakah pemilik pabrik atau pengguna air sungai untuk rekreasi atau keduanya.
4. Dari analisis ini dapat digunakan sebagai dasar penetapan pajak terhadap pencemaran. Tetapi kesulitan terjadi juga apabila terlalu banyak pencemaran dan terlalu banyak pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Coase, R, 1960, *The Problem of Social Cost*, The Journal of Law and Economics, 3: 1 – 44.
- Djajadiningrat, Surna. T, 1997, *Pengantar Ekonomi Lingkungan*, LP3ES, Jakarta.
- Fauzi, Akhmad, 2006, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Lecomber, R, 1979, *Natural Resources Economics*, Mc millan, London.
- Reksohadiprodjo, Sukanto dkk, 1997, *Ekonomi Lingkungan, Suatu Pengantar*, BPFE, Jogjakarta.
- Suparmoko, 1989, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, PAU-Studi Ekonomi UGM , Jogjakarta.

Riwayat Hidup :

Hj. Elly Rusmalia Husen, Dra, Msi lahir di Bandung 1 Januari 1955, Pendidikan terakhir M.Si Unpad Jurusan Studi Pembangunan, Sekarang menjadi dosen DPK di STIE INABA.